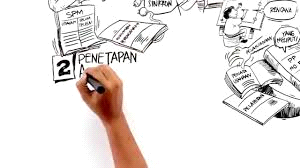
**Delapan Aset Bermasalah di Mataram Belum Tuntas**



*Bpkad.lomboktengahkab.go.id*

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak delapan aset bermasalah yang berada di Kota Mataram, hingga kini belum tuntas. Dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) jadi kendala. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian agar tidak terjadi konflik.

Aset tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pekan kemarin mengungkapkan, penyelesaian aset sudah berproses. Kejaksaan dan KPK telah memfasilitasi menyelesaikan antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat serta Pemprov NTB.

Menuntaskan masalah aset tidak bisa sekaligus. Pihaknya ingin menuntaskan satu per satu. Karena, masing – masing aset memiliki kasus berbeda – beda. “Mana yang porsinya dikerjakan dulu dimulai dari menyisir satu per satu,” kata Alwan.

Salah satunya adalah rumah potong hewan (RPH) Tanjung Karang. Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemkab Lobar dan telah ada titik temu. Setelah itu, akan dilanjutkan menyelesaikan ke aset lainnya.

Alwan menyadari Komisi Antirasuah terus mendorong agar perselisihan kepemilikan aset tersebut segera diselesaikan. Pemkot Mataram telah memiliki rencana aksi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Untuk menyelesaikan aset itu tidak mudah. Benang kusutnya adalah kasus antara satu aset berbeda – beda. Seperti aset RPH Loang Baloq setelah ditelusuri diakui Alwan, ternyata sangat rumit. “Kalau dilihat dari luar memang sedikit. Setelah kita masuk ke dalam ternyata sangat rumit,” ujarnya.

Inspektorat menemukan berbagai macam kendala. Seperti bukti pemilikan dan lain sebagainya. Secara bertahap aset tersebut akan diselesaikan satu per satu. Tim akan menelusuri permasalahan utama seperti dokumen HPL. Pintu masuknya adalah HPL harus ada dari Pemkab Lobar. Demikian pula, bukti HPL dari provinsi yang merupakan induk pemerintahan.

“Kita tetap bekerja. Targetnya semua aset ini tuntas,” demikian kata Alwan. (cem)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/delapan-aset-bermasalah-di-mataram-belum-tuntas/>
2. [S](http://lombokbaratkab.go.id/bpn-dalami-kepemilikan-lahan/)uara NTB, *Delapan Aset Bermasalah di Mataram Belum Tuntas*, Senin, 24 Agustus 2020.

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
* Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

* Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
* Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

* Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

1. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
2. memasang tanda kepemilikan tanah;dan
3. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

* Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
5. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
6. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

* Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

1. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
2. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah